



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNOTO**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **451904**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 380.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 131.000.000

1. MOBIL, Toyota MPNP/MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM/SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
5. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 84.113.789**F. HARTA LAINNYA** Rp. 16.500.000**Sub Total** Rp. 611.613.789**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 611.613.789



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETIYAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 638563

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 510.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m²/60 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.000.000

1. MOTOR, HONDA D1B02N13L2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, SUZUKI UK110NE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.105.863

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 626.105.863

III. HUTANG Rp. 78.555.790

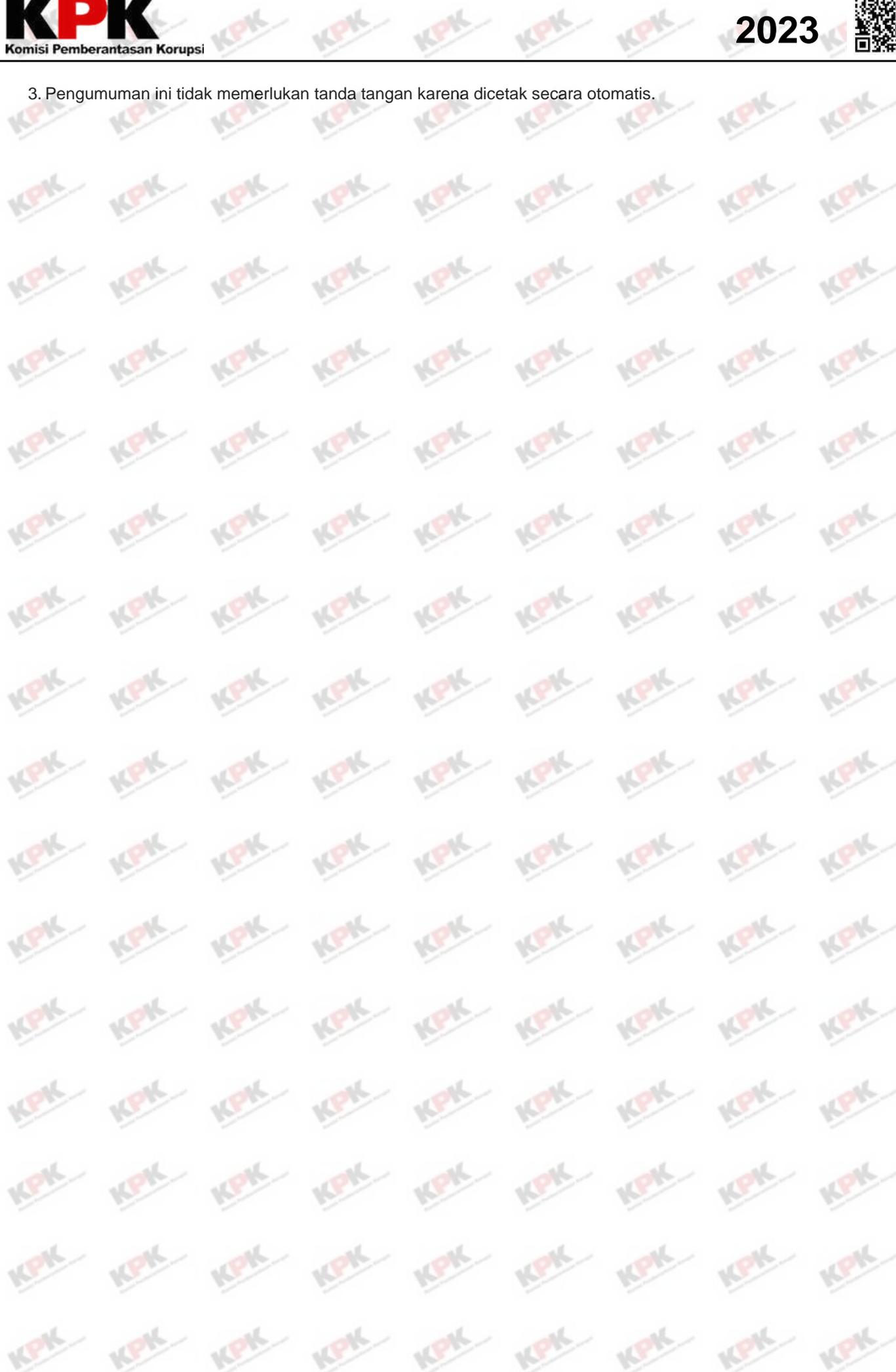
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 547.550.073

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LINDA ANGGRAENI NURSANTI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 280513

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	310.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/85 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	155.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. MOTOR, KAWASAKI EX250S/SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	92.792.390
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	560.292.390
III. HUTANG	Rp.	17.735.930
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	542.556.460

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINI DWI DARYATI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 160347

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/112 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 322.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 386 m2/215 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 322.500.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 94.000.000

1. MOTOR, HONDA CBR150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MX KING Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 40.350.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 72.048.534

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.106.398.534



III. HUTANG

Rp. 228.314.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 878.083.934

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISNUGROHO
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 794429

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.850.000.000

1. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1160 m2/400 m2 di KAB / KOTA GROBOGAN, WARISAN Rp. 2.450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 161.250.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HIBAH TANPA AKTA Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HADIAH Rp. 4.250.000
3. MOBIL, MITSUBISHI COLT MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp. 7.000.000
5. MOBIL, KIA MPNP/MINIBUSI Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.377.811

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.032.627.811

III. HUTANG Rp. 35.624.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.997.003.311



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.